**Peranan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kampar dalam Pemberian Izin Sertifikasi Produksi Pangan
Industri Rumah Tangga**

**Oleh : M. Irfan Hidayat
Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara**

Pembimbing 1 : Dr. Emilda Firdaus S.H., M.H

Pembimbing 2 : Ledy Diana S.H., M.H

Alamat : Jl. Pontianak No. 17, Bukit Raya, Pekanbaru

Email : mirfanhidayat99@gmail.com Telepon : 0811282903

ABSTRACT

Licensing is a subject in State Administrative Law that has a significant role. It serves as a medium for the government to control the public, in an effort to ensure that things are working well. SPP-IRT is a license issued by the Office of Investment and One-Stop Integrated Services (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) for home-based food industry players. The Kampar Regency Government, based on its authority, has assigned the Kampar Regency Office of Investment and One-Stop Integrated Services to issue the license through the Kampar Regency Regulation Number 24 of 2017 on Position, Organizational Structure, Duties, Functions, and Work Procedures of the Kampar Regency Office of Investment and One-Stop Integrated Services. Despite this license issuance authority, there are home-based food businesses that have yet applied for the license.

This research is an empirical and sociological legal one. It focuses on licensing and authority. Sources used include primary and secondary data, which consist of primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection in this research was conducted through observation, interviews, literature review, and questionnaires. After the data were collected, analysis was conducted to draw conclusions.

In this research, it is concluded that, first, the Kampar Regency Office of Investment and One-Stop Integrated Services already provides good service, one of the evidences being the licensing process that have been carried out online. However, the role of outreach programs to familiarize the public with the licensing process is still very minimal, even though the Kampar Regent Regulation Number 24 of 2017 has mandated it. Second, there are no significant obstacles interfering with the licensing process, despite internet connection problems that sometimes occur. Third, the issue with the outreach programs will be addressed. They will be carried out both offline and online.

Keywords: Roles – Licensing – Home-based Industry

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pangan merupakan kebutuhan primer manusia. Makanan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan bagi manusia, termasuk makanan tambahan, bahan baku makanan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiaran, pengolahan dan pembuatan makanan dan minuman.¹

Di sisi lain, pelaku usaha juga dibebankan tanggung jawab dalam melakukan kegiatan industri atau usaha. Tanggung jawab adalah suatu akibat dari kebebasan seseorang tentang perbuatannya atau tentang apa yang telah dilakukan.² Dalam Pasal 111 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ditegaskan bahwa makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan. Makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Izin produsen makanan sendiri terbagi dalam dua jenis, izin edar BPOM dan SPP-IRT.

Izin edar menurut Pasal 8 Peraturan Badan Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 tentang

Pendaftaran Pangan Olahan menyebutkan bahwa izin edar adalah persetujuan hasil penilaian pangan olahan yang diterbitkan oleh kepala badan (BPOM) dalam rangka peredaran pangan olahan.

Selain izin edar, Pasal 111 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menentukan bahwa makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah didapat izin edar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun disisi itu pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengecualikan Industri Rumah Tangga dari kewajiban mengurus izin edar. Izin edar ini kemudian dapat diganti dengan perizinan SPP-IRT. Perizinan PIRT menjadi tanda bahwa produk layak untuk dikonsumsi dan produksi makanan layak untuk dijual.³

Kabupaten Kampar sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang baik setiap tahunnya telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang masif pula. Hal ini dapat terlihat dari kegiatan industri pengolahan pasca panen produk pertanian yang terlihat menjamur, khususnya di kecamatan Tambang. Namun, perkembangan perekonomian ini tidak diikuti sosialisasi yang dikembangkan pula oleh DPM-PTSP dalam perizinan. Hal ini diketahui setelah peneliti melakukan wawancara dengan salah

¹ Sukiman Said dalam Bambang Hermanu, 2014, Studi Implementasi Izin Edar Produk Pangan Industri Rumah Tangga (Pirt) dalam Mewujudkan Keamanan Pangan Yang Optimal Di Kota Semarang, *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat* Vol. 1 NO. 2014, hlm. 151

² Soekidjo Notoadmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 21

³ Meriza Elpha Darnia dan Dasrol, "Perlindungan Konsumen Atas Konsumsi Keripik Nenas Tanpa Label Kadaluwarsa di Desa Rimbo Panjang Kabupaten Kampar", *Riau Law Journal*: Vol. 5, No. 1, 2021, hlm. 21

satu pemilik usaha IRTP.⁴ Dari wawancara tersebut, peneliti mendapatkan data awal bahwa pemilik IRTP ini tidak pernah mendapatkan sosialisasi terkait perizinan.

Hal diatas kemudian menunjukkan bahwa peran DPM-PTSP Kabupaten Kampar dalam perizinan SPP-IRT di Kabupaten Kampar belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, penulis bermaksud membahas bagaimana pengurusan perizinan SPP-IRT di wilayah Kabupaten Kampar, khususnya Kecamatan Tambang sebagai sentra produksi olahan pasca panen pertanian nanas, yang penulis beri judul “Peranan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Kampar Dalam Pemberian Izin Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Kampar dalam pemberian izin Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga?
2. Bagaimanakah kendala dalam pengurusan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar?
3. Apakah upaya yang telah dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar dalam mengatasi kendala pada

pengurusan izin Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar dalam pemberian izin SPP-IRT;
- b. Untuk mengetahui kendala dalam pengurusan izin SPP-IRT pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar;
- c. Untuk mengetahui upa yang sudah dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mengatasi kendala-kendala pengurusan SPP-IRT.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan bagi penulis, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir sarjananya serta memberikan pemahaman bagi penulis terhadap suatu penulisan karya tulis ilmiah yang baik dan benar.
- b. Kegunaan bagi dunia akademik, diharapkan dari hasil penelitian akan memberikan sumbangan pemikiran bagi dunia akademik khususnya dibidang hukum, sehingga hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan menambah literatur dalam melakukan kajian dan penulisan ilmiah bidang hukum selanjutnya.
- c. Kegunaan bagi instansi yang berhubungan, diharapkan proposal skripsi ini dapat dijadikan bacaan oleh masyarakat dan instansi terkait.

⁴ Wawancara dengan Bapak Liyusmar, pada 4 April 2021

D. Kerangka Teori

1. Teori Kewenangan

Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat hukum.⁵ Menurut H. D. Stout, wewenang adalah pengertian dari hukum organisasi pemerintahan yang dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan menggunakan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik dalam hubungan kekuasaan. Kekuasaan seringkali disamakan dengan kewenangan, dan kekuasaan juga sering ditukar dengan istilah kewenangan. Kekuasaan dijumpai sebagai bentuk hubungan bahwa ada yang memerintah dan pihak lain yang diperintah.⁶

Pada intinya, kekuasaan negara adalah sarana dalam mengatur dan menjalankan fungsi pelayanan publik. Kranenburg dan Logemann mengembangkan teori bahwa legitimasi kekuasaan suatu negara adalah sarana dalam diterima sebagai kenyataan.⁷ Kewenangan dalam penerbitan izin SPP-IRT ini merupakan kewenangan bupati/walikota setempat yang kemudian menurut Pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga diteruskan kepada Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

⁵ Indrohato, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 65

⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 35-36.

⁷ Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2000, hlm. 149

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses penjalanan fungsi dan norma-norma hukum pada perilaku yang dapat diamini secara empiris dalam kehidupan sehari-hari. Penegakan hukum juga dapat diartikan sebagai usaha mewujudkan ide abstrak dari keadilan dengan mendapatkan manfaat sosial dari proses tersebut. Satjipto Raharjo berpendapat bahwa penegakan hukum bukanlah merupakan suatu tindakan yang pasti, yaitu menerapkan hukum terhadap suatu kejadian, yang dapat diibaratkan menarik garis lurus antara dua titik.⁸ Menurut Jimly Asshidiqie, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁹ Penerbitan izin SPP-IRT oleh DPM-PTSP merupakan bentuk penegakan hukum secara administrasi negara.

3. Teori Perizinan

Dalam istilah hukum, izin (*vergunning*) diartikan sebagai perkenaan atau syarat dari pemerintah untuk perbuatan yang secara umum memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki.¹⁰ Perizinan juga dapat diartikan sebagai pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha

⁸ Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2002, hlm. 190

⁹ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 98

¹⁰ HR.Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.198

atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.¹¹

Vergunning diartikan E. Utrecht apabila pembuat peraturan tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, keputusan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*).¹² Utrecht berpendapat bahwa perizinan dapat diberikan selama hal tersebut tidak dilarang, dan sudah diatur secara jelas. Meskipun Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga secara harfiah tidak memuat kata “izin”, namun SPP-IRT adalah izin edar produk makanan yang diwajibkan Pasal 111 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. agar makanan yang diedarkan harus memiliki ijin edar terlebih dahulu.

E. Kerangka Konseptual

1. Perizinan adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan.¹³

2. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik¹⁴
3. DPM-PTSP adalah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.¹⁵
4. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.¹⁶
5. IRTP adalah Industri Rumah Tangga Pangan yaitu perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.¹⁷
6. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri,

¹¹ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan* dalam Siti Khotijah, *Buku Ajar Hukum Perizinan*, CV. MFA, Yogyakarta, 2020, hlm. 5.

¹² E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, Ichtiar 1957, Hlm 187 dalam Andrian Sutedi. 2010. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta. Sinar Grafika. hlm. 167

¹³ *Ibid* hlm 167-168

¹⁴ Pasal 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

¹⁵ Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha

¹⁶ Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

¹⁷ Pasal 1 ayat (3) Peraturan Kepala BPOM Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga

keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹⁸

7. SPP-IRT atau Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati/Walikota terhadap Industri
8. PSE adalah Penyelenggara Sistem Elektronik, yaitu setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.¹⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, atau dapat disebut dengan penelitian lapangan, yaitu melakukan kajian hukum yang berlaku serta bagaimana kenyataannya dalam masyarakat.²⁰

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

3. Populasi dan Sampel

Maka yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

JENIS POPULASI	JUMLAH POPULASI	JUMLAH SAMPEL	(%)
Kepala Kepala Seksi Penyelenggaraan Perizinan dan Non-Perizinan A Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar	1	1	100%
Produsen/Industri Rumah Tangga Pangan Keripik Nanas di Desa Kualu Nenas	16	8	50%
Jumlah	17	9	-

4. Sumber Data

1) Data Primer

Data primer diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan responden yang berkaitan dengan penelitian ini, selain itu juga ada dokumen-dokumen yang diperoleh dari lokasi penelitian

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari perpustakaan yang sifatnya mendukung data primer.²¹

a) Bahan Hukum Primer

¹⁸ Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

¹⁹ Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

²⁰ Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 126

²¹ V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian*, Pustaka Baru, Yogyakarta, 2014, hlm. 74.

Bahan hukum primer (primary resource) yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:²²

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- 2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Sektor Pelayanan Publik;
- 3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 4) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
- 5) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
- 6) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan;
- 8) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
- 9) Peraturan Bupati Kampar; Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar;
- 10) Peraturan Bupati Kampar Nomor 68 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Seperti keterangan

Peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, jurnal, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara, metode wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur diartikan dengan metode wawancara di mana si pewawancara telah menyiapkan daftar pertanyaan yang hendak disampaikan kepada responden. Dengan demikian si pewawancara terikat dengan pertanyaan-pertanyaan yang dibuatnya. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi yang dibutuhkan penulis terkait dengan perumusan permasalahan yang diteliti.

b. Studi Kepustakaan, merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji, menelaah dan menganalisis literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan yang sedang diteliti.

6. Analisis Data

Melalui penelitian, akan diadakan analisa dari data yang dikumpulkan dan diolah. Metodologi penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.²³ Dalam penelitian ini, analisa data yang dilakukan adalah analisis kualitatif,

²² Rahman Amin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2019, hlm.62

²³ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika. Jakarta, 2012, hlm.17.

yang akan menghasilkan data deskriptif.²⁴

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perizinan

Dalam istilah hukum, izin (*vergunning*) dijelaskan sebagai perkenaan/izin dari pemerintah yang disyaratkan sebagai upaya menaati peraturan perundang-undangan. Perizinan dapat juga diartikan sebagai legalitas kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan upaya tertentu. Fungsi perizinan selain sebagai administrasi juga dimaksudkan untuk dapat memberikan kontrol terhadap masyarakat. Legalitas ini tentunya tidak boleh bertentangan dengan kelangsungan hidup atau eksistensi bangsa dan negara.²⁵

B. Tinjauan Umum Tentang Industri Rumah Tangga

Industri Rumah Tangga (IRT) adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.²⁶ Menurut Tulus T.H Tambunan, industri rumah tangga pada umumnya adalah unit-unit usaha yang sifatnya lebih tradisional, dalam arti melakukan penerapan sistem organisasi dan manajemen yang baik seperti lazimnya perusahaan modern, tidak ada

pembagian kerja dan sistem pembukuan yang jelas.²⁷

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum tentang Kabupaten Kampar

Kabupaten Kampar dalam Peraturan Daerah Nomor 5 tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kampar 2017-2022 sudah menetapkan visi sebagai kabupaten industri dan pertanian yang berkembang dengan tetap mempertahankan nilai budaya, adat, agama dengan *output* kesejahteraan didalamnya. Hal ini patut juga diperhatikan dalam upaya penciptaan dan pengawasan industri dan pertanian di Kabupaten Kampar.

B. Gambaran Umum Tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Kampar

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar (DPMPTSP) merupakan instansi pemerintahan yang berada dalam lingkungan pemerintah Kabupaten Kampar yang terbentuk melalui Peraturan Daerah Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Adapun pembentukan Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu memiliki tujuan sebagai upaya dukungan terhadap tugas kepala daerah

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, *Op.cit.*, hlm. 25.

²⁵ Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Erlangga, Jakarta. 2010, hlm. 36.

²⁶ Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012, Hal 4 huruf (e)

²⁷ Tulus T.H Tambunan. *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia (Beberapa Isu Penting)*, Jakarta: Salemba Empat, 2002). Hlm. 166

dalam bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar dalam Pemberian Izin SPP-IRT

E. Utrecht menyatakan bahwa filsafat hukum sekiranya mesti menjawab pertanyaan apakah keadilan menjadi ukuran baik buruknya hukum.²⁸ Hukum adalah aturan perundang-undangan yang dibuat oleh suatu kekuasaan untuk mengatur pergaulan hidup bermasyarakat. Maka masyarakat yang hidup atau negara memerlukan aturan-aturan yang secara tertulis, disebut hukum.²⁹

Dalam pemberian izin SPP-IRT misalnya para pengampu kewenangan dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga seyogyanya menegakkan keadilan dengan cara memberikan izin dan memastikan izin mesti dipenuhi setiap pelaku industri. Perizinan SPP-IRT ini kemudian berkaitan dengan pemanfaatan dan pengeloaan kekayaan alam agar bermanfaat bagi semua pihak. Kemanfaatan ini dianut dalam tata hukum Indonesia sebagai konsekuensi logis diterimanya Pancasila sebagai pandangan hidup, secara khusus sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia³⁰

SPP-IRT adalah Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga yang izinnya mesti dicantumkan dalam produk olahan makanan yang beredar di masyarakat. Sebuah usaha dapat dikategorikan sebagai Industri Rumah Tangga apabila telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Kegiatan industri dilakukan di rumah;
- 2) Tenaga kerja tidak lebih dari tiga orang; dan
- 3) Peralatan pengolahan yang digunakan mulai dari manual hingga alat semi otomatis.

Pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan bahwa penyelenggaraan pangan dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar manusia yang membeikan manfaat secara adil, merata dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan nasional. Maka dengan jelas perizinan ini diadakan bukan semata-mata menutup akses kemudahan berusaha bagi usaha kecil, namun mempunyai tujuan yang besar seperti yang disebutkan diatas. Tujuan tersebut tentu perlu dibarengi dengan kerjasama segenap *stakeholder* dan IRTP. Berikut jumlah izin yang diterbitkan DPM-PTSP Kabupaten Kampar:

Periode	Perizinan yang diterbitkan
Januari– Desember 2020	19 Izin

²⁸ E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Ichtiar, Bandung, 1966, hlm. 22

²⁹ Notoatmodjo Soekidjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta: 2010, hlm 43

³⁰ Marlina dan Faisal Riza dalam Adi Tiara Putri dan Ledy Diana, *Peran Serta Masyarakat*

dalam Pengelolaan Sumber Daya Ikan di Kabupaten Bengkalis dalam Perspektif Hukum Laut Nasional, Riau Law Journal Vol. 2 No 1, Mei 2018, hlm. 130

Januari– September 2021	14 Izin
Jumlah	33 Izin

Sumber: Hasil olahan peneliti, berdasarkan data dari Kantor Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar sudah menerbitkan izin SPP-IRT sebanyak 33 izin sejak Januari 2020. Izin yang diterbitkan tersebut merupakan izin baru, bukan perpanjangan izin SPP-IRT yang sudah habis masa berlakunya.³¹ Perizinan yang diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara umum adalah pelayanan perizinan dengan menggunakan sistem PSE. PSE kemudian memiliki tujuan agar memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh layanan perizinan dan non-perizinan yang lebih mudah, cepat, tepat, efisien, transparan dan akuntabel. PSE ini juga diharapkan untuk mempermudah integrasi antara satu lembaga dengan lembaga lain. Selain itu, PSE juga diharapkan dapat membuat digitalisasi dalam pelayanan publik, dalam hal ini juga revolusi industri 4.0 dapat didukung.

Meskipun digitalisasi dalam perizinan sudah dilakukan dengan PSE, namun Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kampar masih minim dalam upaya sosialisasi produk perizinan yang diterbitkan.³² Peran sosialisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Kampar ini tidak berjalan dengan baik. Hal ini menurut peneliti berdampak pada jumlah perizinan baru dan perpanjangan perizinan yang tidak terlalu maksimal diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Namun sayangnya, sosialisasi disebutkan masih belum dilakukan oleh DPM-PTSP, meskipun Pasal 22 ayat (2) Peraturan Bupati Kampar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar menyebutkan DPM-PTSP Kampar memiliki tugas untuk melaksanakan sosialisasi aturan-aturan yang berkaitan dengan penanaman modal dan perizinan dunia usaha. Hal ini tentu berdampak langsung pada minimnya produk perizinan SPP-IRT yang diterbitkan oleh DPM-PTSP Kabupaten Kampar. Aturan terkait sosialisasi ini juga disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Bupati Kampar Nomor 68 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Jawaban Responden mengenai Apakah Sosialisasi Pernah didapat Pelaku Usaha IRTP tentang Perizinan oleh DPM-PTSP Kabupaten Kampar

No	Jawaban	Jumlah	Persentase (%)
1.	Pernah	1	12,5
2.	Tidak Pernah	7	87,5
	Jumlah	8	100

Sumber: Data Hasil Wawancara Peneliti

³¹ Wawancara dengan Bapak Ardianto, selaku Kepala Seksi Penyelenggaraan Perizinan dan Non-Perizinan A, pada 13 Oktober 2021

³² Wawancara dengan Bapak Ardianto, selaku Kepala Seksi Penyelenggaraan Perizinan dan Non-Perizinan A, pada 13 Oktober 2021

Perizinan merupakan aspek yang sangat erat dengan Hukum Administrasi Negara. Perizinan SPP-IRT merupakan perizinan yang berbentuk lisensi. Lisensi menurut Ridwan HR merupakan bentuk perizinan yang sebenarnya.³³ Peranan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam pemberian izin ini seharusnya dimaksimalkan, termasuk juga dalam upaya sosialisasi yang tidak maksimal dilakukan. Sebab, lisensi pada maknanya bertujuan untuk pengawasan dan penertiban oleh pemerintah, dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

B. Kendala dalam Pengurusan Izin Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Ardianto sebagai Kepala Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan & Non-Perizinan Tipe A Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar, beliau menyatakan tidak ada kendala yang berarti dalam pengurusan izin ini dalam internal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kampar sendiri. Namun selama persyaratan dan administrasi yang dibawa oleh pemohon lengkap, pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan segera memproses perizinan. Namun ada kendala-kendala eksternal yang dihadapi oleh DPM-PTSP dalam pengurusan izin. Kendala yang dihadapi oleh DPM-PTSP Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

1. Internet

Letak kantor yang berada di kabupaten kadangkala terganggu jaringannya karena *maintenance*. Pak Ardianto juga menambahkan pada medio Agustus 2020 ketika Kantor Telkom Pekanbaru kebakaran, proses perizinan terhenti beberapa saat karena gangguan sinyal akibat kebakaran tersebut.

2. Geografis

Kabupaten Kampar memiliki luas 11.289 KM². Jumlah ini cukup luas dengan persebaran penduduk yang tidak merata pada setiap kecamatan. faktor geografis juga memberikan kendala dalam penerbitan izin SPP-IRT pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar. Geografis Kampar yang luas dan letak Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bangkinang berpengaruh terhadap izin yang diberikan. Pasalnya, Bangkinang bila ditempuh dari beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar memerlukan waktu tempuh satu hingga dua jam perjalanan darat. Ini kemudian membuat mereka yang semestinya mengurus izin cenderung enggan atau menunda-nunda pengurusan izin tersebut.

Koordinasi antar instansi dalam hal ini Dinas Kesehatan Kampar tidak ada kendala yang berarti. Penyatuan pendapat dan koordinasi antar lembaga berjalan lancar dan baik. Tidak pernah ada perbedaan pendapat antara instansi yang mengakibatkan terdampaknya perizinan secara langsung. Koordinasi ini amat diperlukan sekali, karena izin Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga ini merupakan izin yang tidak hanya berfokus pada industri,

³³ Ridwan HR, *Op. Cit*, hlm. 205

namun juga kesehatan masyarakat secara luas.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar secara teori sudah diberikan kewenangan dalam memberikan izin kepada IRTP. Kewenangan yang diberikan kepada Dinas Penanaman Modal ini sudah didasarkan kepada aturan hukum yang dibuat. Kewenangan ini seyogyanya dipakai juga untuk menemukan atau menyelesaikan kendala-kendala yang dialami oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar dalam pemberian izin SPP-IRT kepada IRTP yang mengurus.

C. Upaya yang Dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Mengatasi Kendala Pengurusan Perizinan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dalam rangka mengatasi kendala yang ada dalam pengurusan izin Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar dan mengimplementasikan Peraturan Bupati Kampar Nomor 68 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Bupati Kampar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Kampar, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar telah melakukan upaya-upaya yang mengatasi kendala tersebut.

Dalam masalah geografis, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar melakukan sinergi dengan kelembagaan lain seperti Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar dalam melihat seberapa jauh atau seberapa banyak industri rumah tangga yang seharusnya mengurus perizinan. Selain itu, dalam penggunaan internet sebagai medium pengurusan izin melalui OSS, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar akan memproses sesegera mungkin apabila koneksi internet sudah pulih.³⁴ Permasalahan internet ini kemudian peneliti nilai bukan kesalahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, melainkan problem nasional yang akses internetnya belum memadai di beberapa daerah. Kendala jarak kantor yang jauh dari beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar dapat diatasi dengan medium OSS itu sendiri. OSS sendiri dapat diakses dimana saja sepanjang terkoneksi dengan internet. Ini memudahkan pelaku industri yang ingin mengurus perizinan tersebut.

Upaya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar dalam mengatasi kendala pengurusan SPP-IRT merupakan perbuatan pemerintah. Perbuatan pemerintah yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

³⁴ Wawancara dengan Bapak Ardianto, selaku Kepala Seksi Penyelenggaraan Perizinan dan Non-Perizinan A, pada 13 Oktober 2021

Terpadu Satu Pintu Kampar dalam hal ini berbentuk perbuatan faktual (*Fiete Logtie Handilugen*) dan perbuatan hukum (*Recht Handilugen*). Perbuatan faktual yang dimaksud adalah upaya-upaya proses perizinan dan teknis, sedangkan perbuatan hukum adalah perizinan itu diberikan dengan konsekuensi hukum yang dibebankan kepada pemberi dan penerima izin setelahnya.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berperan dalam Pemberian izin Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Peran ini diatur secara jelas dalam Peraturan Bupati Kampar Nomor 68 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Bupati Kampar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar belum terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terkait aturan maupun produk perizinan serta tata cara pengurusan izin Sertifikat Pangan Produksi Rumah Tangga.
2. Kendala dalam pengurusan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga adalah wilayah Kabupaten Kampar yang luas, sosialisasi dan anggaran.

3. Upaya dalam mengatasi kendala yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dalam pemberian izin Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga adalah meningkatkan sinergitas dengan dinas dan organisasi perangkat daerah terkait, meningkatkan efisiensi dalam proses pemberian izin serta memberikan izin yang diajukan melalui OSS selekasnya.

B. Saran

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diharapkan mampu berkoordinasi dan melihat potensi produk perizinan yang dapat diterbitkan, dalam hal ini juga melakukan sosialisasi terkait produk perizinan yang diterbitkan, khususnya Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.
2. Untuk mengatasi kendala dalam perihal sosialisasi dan anggaran, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu sesegara mungkin perlu menerbitkan aturan lanjutan atau keputusan tertentu terkait sosialisasi.
3. Sosialisasi yang dilakukan dapat berupa medium *offline* seperti baliho dan *billboard* namun bisa juga melalui sarana *online* seperti menggiatkan penggunaan media sosial, media pemasaran. Selain sebagai upaya implementasi peraturan daerah, sosialisasi ini diharapkan juga dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan target pencapaian perizinan

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali, Zainudin, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Amin, Rahman, 2019, *Pengantar Hukum Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta.
- Arikunto, Suharsimi, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Budiardjo, Miriam, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Dewa, Muh. Jufri, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Unhalu Press, Kendari.
- Indroharto, 1994, *Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Indroharto, 2004, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Jeddawi, H. Murtir, 2011, *Negara Hukum: Good Governance dan Korupsi di Daerah*, Total Media, Yogyakarta.
- Khotijah, Siti, 2020, *Buku Ajar Hukum Perizinan*, CV. MFA, Yogyakarta.
- Marbun, S.F., 2012, *Hukum Administrasi Negara I*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Notoatmodjo, Soekidjo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Pudyatmiko, Sri Y., 2009, *Perizinan: Problem dan Upaya Pembinaan*, Grasindo, Jakarta.
- Ridwan, H.R., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sibuea, Hotma P., 2010, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Erlangga, Jakarta.
- Soehino, 2000, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Sujarweni, V. Wiratna, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Baru, Yogyakarta.
- Sutedi, Adrian, 2010, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, PT Sinar Grafika, Jakarta.
- Tambunan, Tulus T.H., 2002, *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia (Beberapa Isu Penting)*, Salemba Empat, Jakarta.
- Utrecht, E., 1966, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar, Bandung.

B. Jurnal/Skripsi

- Adi Tiara Putri dan Ledy Diana, 2018, "Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Ikan di Kabupaten Bengkalis dalam Perspektif Hukum Laut Nasional", *Riau Law Journal*, No. 1, hlm. 130.
- Alexandre Berg, 2012, "Guns, Law, and Politics: The Political Foundations Rule of Law and Security Sector Reform Louis", Cambridge University Press, *Jurnal Westlaw*, diakses melalui

<http://fh.unri.ac.id/index.php/>

pustaka/, pada tanggal 3 Desember 2021, dan diterjemahkan melalui Google Translate.

Bambang Hermanu, 2014, “Studi Implementasi Izin Edar Produk Pangan Industri Rumah Tangga (Pirt) dalam Mewujudkan Keamanan Pangan Yang Optimal Di Kota Semarang”, *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 11, No. 2, hlm. 151.

Meriza Elpha Darnia, Dasrol, 2021, “Perlindungan Konsumen atas Konsumsi Keripik Nenas Tanpa Label Kadaluwarsa di Desa Rimbo Panjang Kabupaten Kampar”, *Riau Journal Law*, Vol. 5, No. 1, hlm. 21.

untuk Industri Rumah Tangga.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 tentang Cara Produksi Pangan yang Baik